

Judul : Tekan rokok ilegal, legislator usul ringankan beban cukai golongan III
Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tekan Rokok Ilegal Legislator Usul Ringankan Beban Cukai Golongan III

ANGGOTA Komisi XI DPR Said Abdullah memandang, kebijakan afirmatif pada tarif cukai Industri Hasil Tembakau (IHT) golongan III bisa jadi solusi menekan peredaran rokok ilegal. Kebijakan itu sekaligus untuk meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha terhadap seluruh aturan yang berlaku saat ini.

Said menjelaskan, karakter industri rokok nasional pabrikan skala kecil serta menengah sangat beragam, baik dari sisi jenis produk maupun kapasitas produksi. Karena itu, kebijakan cukai harus mempertimbangkan kondisi riil pelaku usaha. Terutama produsen golongan III yang mayoritas belum memiliki kekuatan pasar besar.

Jika beban tarif cukai terlalu berat serta tidak sebanding dengan kemampuan roda bisnis mereka, sebagian pelaku usaha pasti akan kesulitan bertahan. "Kondisi yang sulit inilah yang pada akhirnya bisa mendorong munculnya praktik pelanggaran penggunaan pita cukai rokok ilegal," ujarnya, Senin (22/6/2026).

Keberadaan sektor IHT, lanjut Said, memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja. Sebagai contoh, industri di Madura tercatat mempekerjakan lebih dari 186 ribu tenaga kerja langsung. Itu belum termasuk pekerja tidak langsung serta aktivitas ekonomi turunan yang tercipta pada sektor hilir.

Untuk itu, kata dia, Pemerintah harus memberikan kebijakan afirmatif bagi pabrikan golongan III. Khususnya perusahaan yang masih berada pada tahap awal pengembangan usaha. Langkah taktis itu dipercaya

bisa mendorong para pelaku usaha untuk segera beroperasi secara legal dan menggunakan pita cukai yang resmi.

Negara, sambungnya, harus mendorong pihak pabrikan yang selama ini menggunakan cukai palsu agar dengan sukarela beralih menggunakan cukai resmi. Jika mereka diberikan ruang memadai melalui kebijakan afirmatif yang tepat, kepatuhan pasti akan meningkat dan penerimaan negara juga berpotensi bertambah banyak secara signifikan.

Dia menegaskan, kebijakan afirmatif tidak akan serta-merta menurunkan jumlah total penerimaan negara dari sektor hasil tembakau. "Justru sebaliknya, saat semakin banyak produsen yang masuk ke dalam sistem resmi, maka semakin besar pula potensi total penerimaan cukai yang bisa dihimpun Pemerintah," tegasnya.

Selain meningkatkan kepatuhan, kebijakan itu juga diyakini bisa mempermudah proses pengawasan dan menekan angka pelanggaran di sektor industri hasil tembakau. Dengan semakin banyak pelaku usaha yang menggunakan pita cukai legal, upaya penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif serta terukur jelas.

Persoalan industri hasil tembakau saat ini, lanjutnya, bukan pada jumlah lapisan tarif cukai, melainkan akomodasi kondisi pabrikan kecil dan menengah lewat kebijakan afirmatif. "Dengan pendekatan itu, Pemerintah bisa menjaga iklim usaha sehat, melindungi lapangan kerja, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai," ucapnya. ■ PYB